

FAKTOR PENENTU KINERJA MANAJERIAL SKPD DI KOTA BENGKULU

Rekha Melinda, Fadli

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to examine the effect of public accountability, clarity of budget targets, and management control systems on SKPD managerial performance.

The population of this study was all SKPDs of Bengkulu City. Data collection using a questionnaire. Obtained as many as 89 respondents consisting of echelon II, echelon III, echelon IV officials. Data analysis using multiple linear regression.

The results showed that public accountability, clarity of budget targets, and management control systems had a positive and significant effect on SKPD managerial performance.

Keywords: public accountability, clarity of budget objective, management control system, managerial performance SKPD

1. Pendahuluan

Kinerja manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Kinerja manajerial menunjukkan kemampuan dan prestasi seorang manajer dalam menjalankan organisasi untuk mewujudkan tujuan yang mengarah kepada ketercapaian pelayanan publik. Mahsun (2006:198), mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Selain itu menurut Manurung (2012) pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Mardiasmo (2009:20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sejalan dengan penelitian Putra (2013) menunjukkan bahwa ada pengaruh antara akuntabilitas publik dengan kinerja manajerial SKPD.

Terkait dengan akuntabilitas kinerja berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan berbagai hal yaitu anggaran, sistem pelaporan dan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan elemen penting karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi dan motivasi. Sistem pengendalian yang baik akan menghasilkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif dan merata. Tujuan dari sistem pengendalian manajemen sektor publik pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kinerja manajerial dan meningkatkan suatu pertanggungjawaban yang berdampak pada masyarakat (Darma, 2004).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut (Kenis, 1979). Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Persoalan yang muncul di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan data yang diperoleh dalam sistem pemerintahan, seringkali terjadinya pengalihan jabatan yang terlalu cepat di tahap pimpinan, seperti pemutasian kalangan pejabat, sehingga pemantapan pertanggungjawaban terhadap kerja dapat menjadi lemah. Dari beberapa temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan perwakilan Kota Bengkulu, yang diantaranya yaitu terdapat pemborosan penganggaran, pengadaan yang tumpang tindih, lemahnya pengelolaan sumber daya seperti ini dimungkinkan disebabkan karena buruknya peran manajerial. Selain itu tata kelola pemerintahan di Provinsi Bengkulu terburuk peringkat ke-3 se Indonesia atau hanya memiliki angka 4,77 persen masih jauh dibawah rata-rata nasional 5,60. Hal ini dikarenakan masih minimnya transparansi pemerintah daerah terhadap publik.

Berdasarkan LAKIP provinsi Bengkulu tahun 2013 diketahui bahwa kinerja pemerintah di Kota Bengkulu harus diperbaiki dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bengkulu (SAKIP) dan laporan akuntansi kinerja instansi pemerintah harus diperbaiki. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dalam penilaian SAKIP dengan 80% dan LAKIP 20% perlu disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Sumber: LAKIP Provinsi 2013).

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial SKPD pada Pemerintah Kota Bengkulu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Goal Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan)

Goal setting theory merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Locke dan Latham (1990: 5). Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang.

Asumsi dalam goal setting theory menyatakan bahwa penetapan tujuan menunjukkan sasaran

yang sulit dan spesifik menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada tanpa sasaran, yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan kerja. Dengan menggunakan pendekatan goal setting theory, kinerja pegawai yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan sebagai tujuannya. Teori ini juga berlaku pada organisasi pemerintah daerah, apabila dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, maka akan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja yang baik harus ada kesesuaian antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Biasanya tujuan organisasi telah diatur dalam peraturan-peraturan organisasi, sedangkan tujuan individu disesuaikan dengan motivasi tertentu yang dipengaruhi oleh faktor individu. Implikasi teori tersebut terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan hubungan antara variabel, dengan asumsi bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian manajemen dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

2.2. Akuntabilitas Publik dan Kinerja Manajerial SKPD

Mardiasmo (2002: 103) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Aji (2011) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD se-Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD se- Kabupaten Wonosobo. Putra (2013) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kota Padang. Astini (2014) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil ketiga penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semakin kuat akuntabilitas publik, maka kinerja manajerial SKPD akan semakin meningkat atau sebaliknya. Pengembangan hipotesis berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan akuntabilitas publik dan kinerja manajerial SKPD serta teori-teori yang ada, maka dapat diajukan hipotesis.

H1: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kota Bengkulu

2.3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kinerja Manajerial SKPD

Penelitian ini menggunakan teori goal-setting sebagai teori utama. Teori ini menyatakan bahwa setiap organisasi harus menetapkan sasaran yang diformulasikan kedalam tahapan perencanaan dalam menyusun anggaran agar setiap organisasi mampu untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Indraswari (2009) meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Astini (2014) meneliti tentang

pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. Secara keseluruhan berdasarkan hasil kedua penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai kebijakan umum APBD. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing- masing SKPD mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu hipotesis ke dua penelitian ini sebagai berikut.

H2 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kota Bengkulu.

2.4. Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Manajerial SKPD

Sistem pengendalian manajemen merupakan proses seorang manajer memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Manurung (2012) meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja SKPD Kota Palangkaraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Kota Palangkaraya. Astini (2014) meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. Secara keseluruhan berdasarkan hasil kedua penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semakin kuat sistem pengendalian manajemen, maka kinerja manajerial SKPD akan semakin baik. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ketiga sebagai berikut.

H3 : Sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kota Bengkulu

2. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV yang bekerja pada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Bengkulu. Alasan penetapan populasi ini, karena pejabat Eselon II dan III mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan (kebijakan) seperti apa yang harus dilakukan oleh pimpinan, bahkan pejabat Eselon III harus lebih matang dibandingkan pimpinannya. Pejabat Eselon III lebih berperan dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang ditunjang dengan kemampuan teknis operasional yang telah dibuat, seperti kemampuan dalam mengarahkan pembuatan petunjuk teknis operasional kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV. Sementara Penentuan sampel penelitian menggunakan Rumus Slovin, karena dalam penelitian ini jumlah populasinya kurang dari 1000 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 89 Orang.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel antara lain: Variabel Terikat (Y) dan Variabel Bebas (X). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian manajemen.

- a. Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adalah hasil dari proses aktivitas manajerial sektor publik yang efektif dalam melaksanakan kegiatan manajerial mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan terhadap 2 (dua) indikator yang meliputi (a) kinerja manajerial intern dan (b) kinerja manajerial ekstern. Instrumen Kinerja Manajerial SKPD diambil dari Putri (2013) dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi manajerial yang terdapat dipemerintah daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006. Variabel penelitian Kinerja Manajerial SKPD diukur menggunakan 8 pertanyaan dengan Skala Likert 1-5.
- b. Akuntabilitas Publik (X1) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan terhadap 3 (tiga) indikator yang meliputi (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, serta (c) penyajian dan pertanggungjawaban. Variabel akuntabilitas publik diukur menggunakan kuesioner yang diambil dari Manurung (2013), variabel akuntabilitas publik diukur dengan 11 pertanyaan dengan Skala Likert 1-5.
- c. Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan terhadap 2 (dua) indikator yang meliputi (a) kejelasan mengenai isi program (kegiatan) dan (b) kejelasan mengenai laporan program (kegiatan). Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran diukur menggunakan kuesioner yang diambil dari Abdullah (2005). Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan 8 pertanyaan dengan Skala Likert 1-5.
- d. Sistem Pengendalian Manajemen (X3) adalah suatu konsep yang terdiri dari beberapa unsur yang digunakan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. (Langfield-Smith, 1997). Pengukuran terhadap variabel ini dilakukan terhadap 5 (lima) indikator yang meliputi (a) struktur organisasi, (b) rencana kerja dan anggaran, (c) pemeriksaan, (d) prosedur kerja, dan (f) kinerja dan laporan. Variabel sistem pengendalian manajemen diukur menggunakan kuesioner yang diambil dari Manurung (2013), variabel sistem pengendalian manajemen diukur dengan 12 pertanyaan dengan Skala Likert 1-5.

3.2 Metode Analisis

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian manajemen terhadap variabel dependen, yaitu kinerja manajerial SKPD Kota Bengkulu. Persamaan yang digunakan dalam analisis Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$KM_SKPD = \alpha + \beta_1 AP + \beta_2 KSA + \beta_3 SPM + e$$

Keterangan:

KM_SKPD = Kinerja manajerial SKPD Kota Bengkulu

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari variabel independen

AP = Akuntabilitas publik

KSA = Kejelasan sasaran anggaran

SPM = Sistem pengendalian manajemen

e = Kesalahan perkiraan (Error of Estimation)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menampilkan jawaban responden pada masing-masing variabel penelitian. Tabel 1 merupakan statistik deskriptif penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Rata-rata Teoritis	Kisaran Aktual	Rata-rata Aktual	Std. Deviasi
Kinerja Manajerial SKPD (Y)	89	8 – 40	24	30-40	35,69	2,534
Akuntabilitas Publik (X1)	89	11 – 55	33	44-55	49,82	2,304
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	89	8 – 40	24	26-40	34,49	3,699
Sistem Pengendalian manajemen (X3)	89	12 – 60	36	40-59	51,16	4,527

Berdasarkan Tabel 1 diatas, variabel kinerja manajerial mempunyai nilai rata-rata (mean) pada kisaran aktual sebesar 35,69 lebih besar dari pada nilai rata-rata (mean) teoritis. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden mengenai variabel kinerja manajerial pada SKPD Kota Bengkulu telah memiliki kinerja yang baik. Pada variabel akuntabilitas publik memiliki nilai rata (mean) pada kisaran aktual sebesar 49,82 lebih besar dari pada nilai rata-rata (mean) teoritis, yang mengindikasikan bahwa jawaban reponden mengenai akuntabilitas publik pada SKPD Kota Bengkulu juga sudah baik. Selanjutnya variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai rata (mean) pada kisaran aktual sebesar 34,49 lebih besar dari pada nilai rata-rata (mean) teoritis, mengindikasikan bahwa jawaban reponden mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran pada SKPD Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Terakhir variabel sistem pengendalian manajemen memiliki nilai rata (mean) pada kisaran aktual sebesar 51,16 lebih besar dari pada nilai rata-rata (mean) teoritis, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban reponden mengenai Sistem Pengendalian manajemen pada SKPD Kota Bengkulu sudah terlaksana dengan baik.

3.4. Hipotesis dan Pembahasan

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi yang memenuhi asumsi klasik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan sistem pengendalian manajemen (X3) terhadap kinerja manajerial SKPD (Y). Hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS.Version 16 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Coeff.	t	Sig.
Akuntabilitas Publik (X1)	0,263	2,346	0,021
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	0,143	2,052	0,043
Sistem Pengendalian manajemen (X3)	0,118	2,082	0,040
<i>R square</i>			0,155
<i>Adjusted R²</i>			0,125
<i>F</i>			5,197
<i>Sig.</i>			0,002

Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) = 0,155. Hal ini mengandung pengertian bahwa 15,5% variabel kinerja manajerial SKPD dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas publik (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan sistem pengendalian manajemen (X3), sedangkan sisanya sebesar 84,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian. Berikutnya hasil uji diperoleh nilai $F = 5,197$ dengan nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak dan ketiga variabel mampu menjelaskan fenomena bagaimana kinerja manajerial SKPD di Kota Bengkulu.

Hasil pengujian hipotesis pertamamenunjukkan signifikansi variabel akuntabilitas publik (0,021) kurang dari tingkat signifikan ($\alpha < 0,05$), maka dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD dengan nilai ($\beta = 0,263$) dengan nilai t-statistik . Hal ini berarti semakin baik akuntabilitas publik maka akan semakin baik kinerja manajerial SKPD.

Selanjutnya variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukka signifikansi sebesar 0,043 atau kurang dari ($\alpha < 0,05$), maka dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima. Hal ini membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD dengan nilai ($\beta = 0,143$) dengan nilai t-statistik . Hal ini berarti semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akan semakin baik kinerja manajerial SKPD.

Terakhir hasil uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel sistem pengendalian manajemen (0,040) kurang dari tingkat signifikan ($\alpha < 0,05$), maka dapat disimpulkan hipotesis 3 diterima. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD dengan nilai ($\beta = 0,118$) dengan nilai t-statistik . Hal ini berarti semakin baik sistem pengendalian manajemen maka akan semakin baik kinerja manajerial SKPD.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial SKPD, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif pada kinerja

manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas publik maka akan meningkatkan kinerja manajerial SKPD, kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif pada kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akan meningkatkan kinerja manajerial SKPD, dan sistem pengendalian manajemen memiliki pengaruh positif pada kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian manajemen yang dilakukan maka akan semakin berkurangnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD.

References

- Abdullah, H. (2005). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi pada Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis tidak Dipublikasikan. Program Pascasarjana, Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Aji, F.S. (2011). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo. Skripsi tidak Dipublikasikan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Anthony, R.N dan Govindajaran, V. (2008). Sistem Pengendalian Manajemen Buku 2. [Terjemahan: Kurniawan Tjakrawala]. Jakarta: Salemba Empat.
- Astini, N.K. (2014). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2, No. 1.
- Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Bengkulu. (2014). Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Bengkulu Tahun 2014. Bengkulu: Tim Penyusun.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. (2014). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. Nomor: LAP- 005/PW06/1/2014, Tanggal 6 Januari 2014. Bengkulu: Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
- Darma, E.S. (2004). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah. Tesis tidak Dipublikasikan. S2 Program Pascasarjana, Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ellwood, S. (1993). Paris and Town Councils: Financial Accountability and Management, *Local Government Studies*. Vol. 19, pp 368-386.
- Erdhianty, D. (2011). Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Keenam. ISBN 979-3873-00-0. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Ghozali, I. (2013). Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 16. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 16. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indraswari, K. (2009). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. [Abstraksi]. Program Pascasarjana, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Dari: <http://eprints.undip.ac.id/7832/>. [Diakses: 02 Januari 2015, Pukul: 12.45 WIB].
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *Accounting Review*, October, pp. 707- 721.
- Kumorotomo, W. (2005). Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Langfield-Smith, K. (1997). Management Control Systems and Strategy: A Critical Review. *Accounting Organization and Society*. Vol. 22, pp. 207-232.
- Locke, E.A dan Latham, G.P. (1990). *A Theory of Goal Setting and Task Performance*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Mahoney, T.A, Jerdes, T.H. and Carroll, S.J. (1963). *Development of Managerial Performance: A Research Approach*. Cincinnati: South Western Publishing.

-
- Manurung, Daniel. T.H. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol. 2, No. 1, Hal. 1-30.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi dan Setyawan, J. (2001). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Organisasi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Skripsi tidak Dipublikasikan. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
- Putri, Gustika Yolanda. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian InternP Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Di Kota Padang. *Journal Article*.
- Riduwan. (2007). *Belajar Mudah Penelitian Guru, Karyawan, Peneliti Pemula*. Alfabeta. Bandung.
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar, dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu.
- Suhartono dan Mochammad. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, Edy. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Widener, S.K., and Selto, F.H. (1999). Management Control Systems and Boundaries of the Firm: Why Do Firms Outsource Internal Audit Activities? *Journal of Management Accounting Research*, Vol. 11, No. 1, pp. 45-73.
- Widener, S.K. (2004). An Empirical Investigation of the Relation Between the Use of Strategic Human Capital and the Design of the Management Control System. *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 29, No. 2, pp. 377-399.

Halaman ini sengaja dikosongkan